



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES
TIMUR**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)
TAHUN 2023**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN FLORES TIMUR

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

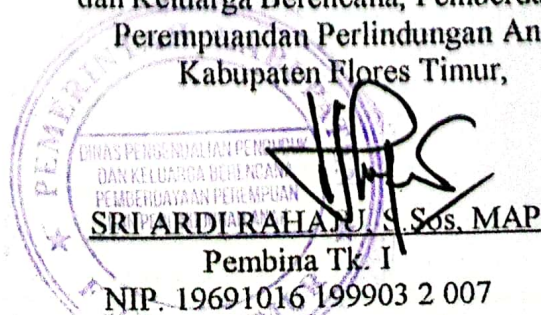
Puji dan Syukur kami Panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan tuntunan- Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 13 Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

RENJA PD 2023 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

RENJA PD 2023 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD 2023 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD 2023.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur,


SRIARDIRAHAJU, S. Sos, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19691016 199903 2 007

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
PERBUP RENSTRA.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD T.A. 2021.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI Perangkat Daerah.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	74
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	74
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	74
3.3. Program dan Kegiatan.....	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	87
BAB V PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan).....	7
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.	30
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	71
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	75
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	76
Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2023.	88

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1. Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah2



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR: 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

SALINAN



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023. /

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

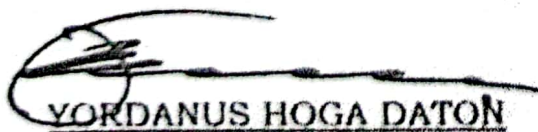
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

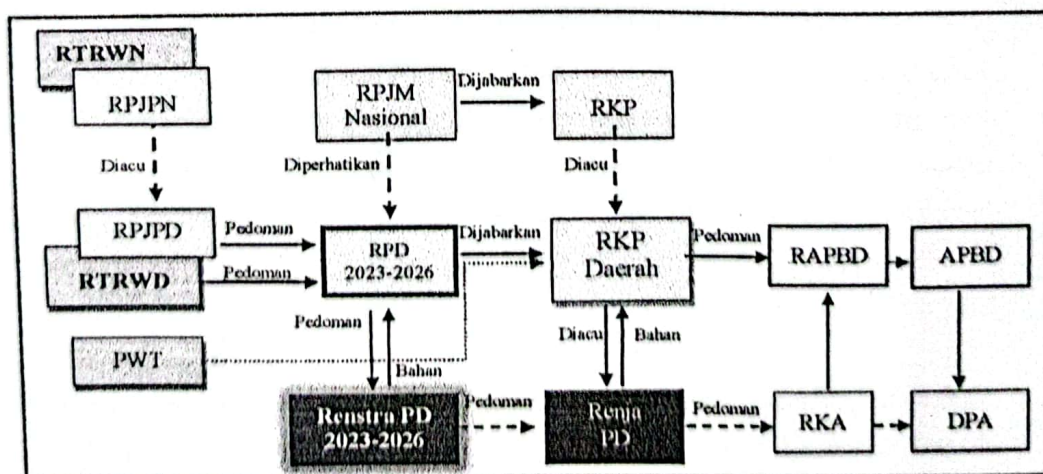
1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasar hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Berdasarkan bagan pada gambar tersebut maka terlihat sangat jelas hubungan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.. Selain itu Renja Perangkat

Daerah juga memiliki hubungan yang erat dengan dokumen penganggaran karena Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disusun mengacu pada Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021- 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN DINAS P2KBP3A

Pada Bab ini memuat tiga hal pokok yakni Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat secara detail gambaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan dan lokasi dalam rencana kerja tahun 2023.

BAB. V PENUTUP

Pada Bab ini berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2021 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Flores Timur

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100
						<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	49	42	100	100	100	100	100	100
						<i>Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)</i>	20	12	4	4	100	4	20	100

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)</i>	20	12	4	4	100	4	20	100
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan</i>	-	-	14	14	100	14	14	-
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Penerima Jasa adminstrasi pengelola keuangan (Bulan)</i>	60	36	12	12	100	12	60	100

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun [n-3] 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 [n-2]			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun [n-1] 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan [n-1] 2022	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan (jenis)	237	45	50	45	90	50	140	59
						Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan (jenis)	74	15	15	15	100	15	45	60,8
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	801467	58750	136667	58750	42,9	136667	254167	31,7
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor (dos)	8133	367	1889	367	19,4	2000	2734	33,6
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	422	68	95	68	71,5	100	236	55,9

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat (Lembar)	2417	508	500	109	21,8	500	1117	46,21
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80,0
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	74	74	74	74	100	93	93	125,6
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit)	5	4	5	4	80	5	5	100
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)								
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	1	1	1	1	100	1	1	100
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertelaksananya Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan gedung kantor (jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan									

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
		Perempuan dan Perlindungan Anak									
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	20	20	20	20	100	20	100
			Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang terbina (Lembaga Anak dan Lembaga Perempuan)	56	3	47	17	36,1	19	39	69,6
			Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65	42	65	63	96,92	46	64	98,46
2	08	02	2.01								
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan								

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Kabupaten/Kota									
2060220102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Anak (Lembaga)	74	0	74	0	0	55	55	74,3
2060220104	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	750	0	150	0	0	150	150	20
20602202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)</i>	192	0	0	0	0	0	0	0
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	<i>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)</i>	100	0	20	0	0	20	20	20
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	<i>Jumlah Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan (Kali)</i>	-	-	-	-	-	1	1	0

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
					Kabupaten/Kota								
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)							
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)							

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)</i>	750	0	150	0	0	150	150	20
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<i>Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)</i>								
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non- pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)</i>								

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)				
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	95	0	19	0	0	19	19	20
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	68	53,63	68	55	80,8	68	68	100
						Cakupan Akseptor Baru (%)	70	70	70	54	77,1	70	70	100
						Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	25	15	5	5	100	5	25	100

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)								
							320	0	90	90	100	76	76	23,7
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	68		68	55	80,8	68	67	98,5

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
						Kabupaten/Kota								
2	14	03	2.03	01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
						<i>Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)</i>	5	5	5	5	100	5	5	100
2	14	03	2.03	06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
						<i>Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket):</i>	19	3	3	3	100	3	9	47

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)	15800	14127	15700	14370	91,52	15800	15800	100
						Jumlah peserta konseling KB (orang)	1250	7544	250	7649	3.060	250	7899	632
						Jumlah Remaja yang dibina (orang)	240	50	60	30	50	60	140	58,33
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)	63	63	63	63	100	63	63	100
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)	320	0	80	0		80	80	25
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan									

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaln Program (Renstra Perangkat Daerah) 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d Tahun berjalan	Tingkat Capalan Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
					Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB)								
							74	61	61	61	100	61	61	82,4

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian kinerja pada pada tahun 2021 Program Keluarga Berencana belum mencapai target. Hal ini terlihat pada capaian dari dua indikator program yang belum optimal yakni cakupan PUS peserta KB aktif sebesar 55% dari yang ditargetkan sebesar 68% dan cakupan akseptor baru sebesar 54% dari yang ditargetkan sebesar 70%. Faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab tidak tercapainya target pada indikator-indikator tersebut adalah dukungan kualitas SDM yang belum optimal, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk ber KB serta partisipasi Pria ber KB juga masih rendah. Sedangkan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada beberapa indikator yang menunjukkan capaian kerjanya belum optimal dan perlu mendapat perhatian. Indikator-indikator tersebut antara lain Penguatan Kelembagaan Anak, Pembentukan Forum Anak, Bimbingan Manajemen Usaha Perempuan serta Frekuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini;

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Total Fertiliti Rate (TFR)		√	3,0	3,1	3,0	2,9	3,2		3,0	2,9	Angka TFR masih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional
2	Rata rata Jumlah anak per Keluarga		√	3	3	3	3	3		3	3	
3	Ratio Akseptor KB (%)		√	67	70	69	62	51,24		69	62	Tingkat Kesadaran masyarakat untuk ber KB sudah semakin meningkat
4	Angka pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 s/d 49 tahun (%)		√	67	70			52,51				DO tinggi (bisa jadi karena menopause, suami/istri pindah atau merantau, suami atau istri meninggal)
5	Angka Kelahiran Remaja perempuan 15 – 19 tahun per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun /ASFR		√		0,8	0,9		10		0,9		Kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang kespro bgi remaja
6	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed) (%)		√	70	75	22	20	27,95		22	20	Tingginya PUS perantau dan PUS yang umur istrinya diatas 45 tahun enggan ber KB dan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
												takut efek samping
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		√	70	75			74,53				Masyarakat sudah merasakan manfaat bahwa penggunaan alokasi MKJP lebih baik dan lebih aman
8	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian Kontrasepsi (%)		√	13	12			13				
9	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/mahasiswa (%)		√	17	17	16	16	22		16	16	Minimnya Advokasi yang dilakukan
10	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)		√	100	100			100				Tenaga PKB dan PLKB yang berada dilapangan sudah didayagunakan sesuai tugas dan fungsinya
11	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan		√	100	100			100				PPKBD/Sub PPKBD berada disetiap Desa dan bekerja sesuai tugas sebagai kader PPKB/Sub PPKB
12	Persentase Partisipasi		√	44	45	46	47	51		46	47	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	perempuan di Lembaga pemerintah (%)											
13	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)		√	6,66	6,66	3,3	6,6	3,3		3,3	6,6	
14	Ratio KDRT (Kasus)		√	2,40	2,0	0	0	20		0	0	Secara faktual masih terjadi kasus KDRT yang diakibatkan oleh berbagai faktor.
15	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		√	45	46	47,50	48,50	62,88		47,50	48,50	Kegiatan yang mendukung untuk melakukan advokasi, pendampinga n dan sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang
16	Ratio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)		√	85	90							Kegiatan yang mendukung untuk melakukan advokasi, pendampinga n dan sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang dan pemdes melaui dana

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
												desa hampir semua desa belum menggunaka n dana untuk kegiatan yag mendukung indikator
17	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		√	65,65	66,5	53,63	54,75	31,2		53,63	54,75	Belum optimalnya para petugas untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan dan tingkat kesadran masyarakat ber KB masih rendah, peserta KB yang selalu berpindah2, merantau.
18	Cakupan Akseptor Baru (%)		√	70	70	70	62	54		70	62	Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah
19	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang terselesaikan (%)		√			0,001	0,001			0,001	0,001	
21	Persentase kekerasan terhadap anak (%)		√			0,02	0,02			0,02	0,02	Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Kekerasan terhadap anak
22	Persentase Desa/Kelurahan layak anak (%)		√			8	12			8	12	Perlu ada kolaborasi

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
												dengan pemerintah desa/kel untuk dipecepat pembentukan desa/kel layak anak
23	Persentase perempuan yang berpartisipasi di sector publik (%0		√			46	47			46	47	Kegiatan yang mendukung untuk melakukan advokasi, pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang dan pemdes melalui dana desa hampir semua desa belum menggunakan dana untuk kegiatan yag mendukung indikator

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang ada menunjukkan bahwa belum seluruh indikator memperoleh hasil yang optimal. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai bagian dari permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A dan berpengaruh pada capaian kinerja adalah sebagai berikut: Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB, Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan KB, Kurangnya dukungan lintas sektor dalam program KB, Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai, Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran belum optimal, Fasilitas sarana prasarana publik yang responsif gender belum tersedia secara memadai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA serta tuntutan regulasi atau kebijakan nasional untuk isu prioritas tertentu. Berdasarkan pada beberapa faktor tersebut maka ditetapkan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari *Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana* yang menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas belum optimal.
3. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Program KB.
4. Tingginya Angka keluarga beresiko stunting.
5. Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
6. Terbatasnya jumlah lembaga / forum untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan dan Anak serta belum berperan maksimal.
7. Dukungan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih sangat terbatas.
8. Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
9. Aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi terbatas.
10. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelayanan publik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel II.3 Sebagai berikut:

Tabel II.3

Riview Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
				01											
2-08	2-14	0-0			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10,962,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10,982,000,000	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan	OPD/Larantuka		100%	3,841,000,000	Program Penunjang Urusan	OPD/Larantuka		100%	3,841,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	OPD/Larantuka	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	3,841,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	OPD/Larantuka	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	3,841,000,000	
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	75%				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	75%		
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	50%				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	50%		
			2.01				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%		

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
												keuangan (%)			
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	6	85,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	6	85,000,000	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	3 Dok	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	3 Dok	20,000,000	
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	2 Dok	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	2 Dok	5,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	7 Laporan	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	7 Laporan	35,000,000	
x	xx	01	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Dok	25,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Dok	25,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)		
1					2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semeseteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3 Lap	2,369,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semeseteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3 Lap	2,369,000,000		
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD/Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	28 orang/12 bulan	2,300,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD/Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	28 orang/12 bulan	2,300,000,000		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1dok	54,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1dok	54,000,000		

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SKPD					SKPD		pada SKPD			
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		10,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		10,000,000	
x	xx	01	2.06	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	10,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	10,000,000	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	0	160,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	0	160,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	OPD/Larantuka	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	5 Paket ATK	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	OPD/Larantuka	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	5 Paket ATK	25,000,000	
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bahan Kebersihan Kantor)	OPD/Larantuka	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket) or yang disediakan (paket)	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bahan Kebersihan Kantor)	OPD/Larantuka	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket) or yang disediakan (paket)	2 Paket	5,000,000	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM, Makanan Minum Rapat Internal)	OPD/Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	12 Paket BBM, 12 Paket Makanan Minum	60,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM, Makanan Minum Rapat Internal)	OPD/Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	12 Paket BBM, 12 Paket Makanan Minum	60,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD/Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD/Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	20,000,000	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu Rapat)	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu Rapat)	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12 Laporan	15,000,000	
x	xx	01	2.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35,000,000	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		133,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		133,500,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Daerah (unit)			
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan	1 unit Website Dinas	3,500,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan	1 unit Website Dinas	3,500,000	
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit Laptop, 5 Unit Printer	50,000,000	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6 Unit Laptop, 5 Unit Printer	70,000,000	Kondisi laptop dan printer yang sudah ada lebih banyak dalam kondisi rusak
x	xx	01	2.08	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit Pagar dan Parkiran, Terali, gorden	80,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit Pagar dan Parkiran, Terali, gorden	80,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	930,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	930,000,000	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	2,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	2,200,000	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	25,000,000	
x	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	10,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kantor		Kantor yang Disediakan			Kantor		Pertengkapan Kantor yang Disediakan			
x	xx	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan 93 Tenaga	892,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan 93 Tenaga	892,800,000	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	138,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	138,500,000	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	OPD/Larantuka	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	4	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	OPD/Larantuka	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	4	100,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Aset Wbsite	1,500,000	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Aset Wbsite	1,500,000	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 Unit	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 Unit	12,000,000	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	5 Laptop, 4 Printer	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	5 Laptop, 4 Printer	15,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPJ					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya					
x	xx	01		1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	2 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	2 Unit	10,000,000	
2	08		2.01		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				467,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				467,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	02	2.01		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik(%)	46,00	145,000,000	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik(%)	46,00	145,000,000	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)	5	50,000,000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)	5	50,000,000	
2	08	02	2.02	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Pengarusutaman	5	50,000,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	5	50,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							aan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah)					Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah)			
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat		70,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan		70,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Kewenangan Kab/Kota		Kewenangan Kab/Kota (dokumen)			Kab/Kota		Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)			
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	30,000,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	30,000,000	
2	08	02	2.03	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	19 Kec	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	10	40,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	19 Kec	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan	10	40,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					i Perempua n dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)			i Perempua n dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)			
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)		25,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)		25,000,000	
2	08	02		02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	26	25,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia	26	25,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)			Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)			
2	08	03	2.03		Program Perlindungan Perempuan		Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001%	45,000,000	Program Perlindungan Perempuan		Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001%	45,000,000	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/K		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kab/Kota yang mendapat Penguatan dan Pengembangan		45,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/K		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kab/Kota yang mendapat Penguatan		45,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ota		n (lembaga)			ota		dan Pengembangan (lembaga)			
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (orang)	24	25,000,000	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (orang)	24	25,000,000	
2	08	03		04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	1	20,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia	1	20,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP'D					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Perempuan Kewenangan Kab/Kota (dokumen)			Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (dokumen)			
2	08	04	2.01		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		147,000,000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		147,000,000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Dokumen KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		40,000,000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Dokumen KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		40,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPJ					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	04	2.02	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (laporan)	1	40,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (laporan)	1	40,000,000	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/K		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya serta Penguatan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan		80,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/K		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya serta Penguatan Jejaring Lembaga Penyedia		80,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ota					ota		Layanan			
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	4	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	4	25,000,000	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang	10	25,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Larantuka	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	10	25,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (orang)			Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (orang)			
2	08	04	2.03	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	30,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	30,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)	1	27,000,000	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)	1	27,000,000	
2	08	04		01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (layanan)	2	27,000,000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	27,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/ Kota (layanan)			
2	08	05	2.01		Program Pengelolaan Sistem Data Dan Gender		Presentase desa/kelurahan menyediakan data gender(%)	25	40,000,000	Program Pengelolaan Sistem Data Dan Gender		Presentase desa/kelurahan menyediakan data gender(%)	25	40,000,000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	40,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	40,000,000	
2	08	05		01	Penyediaan Data Gender dan Anak di		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan	1	40,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di	1	40,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	06	2.01		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02%	90,000,000	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02%	90,000,000	
							Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	8				Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	8		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30,000,000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	30,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	30,000,000	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Larantuka		1	60,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Larantuka		1	60,000,000	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	Larantuka	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	35	25,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	Larantuka	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas	35	25,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota		Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)			Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota		Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)			
2	08	06		04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	1	35,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	35,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				6,654,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				6,654,000,000	
2	14	02	2.01		Program Pengendalian Penduduk		Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	7	205,000,000	Program Pengendalian Penduduk		Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	7	205,000,000	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Laporan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sarasehan dan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana		205,000,000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Laporan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sarasehan dan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana		205,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/S UB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	14	02	2.02	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota (dokumen)	1	95,000,000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota (dokumen)	1	95,000,000	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan	6	55,000,000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan	6	55,000,000	
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	1	35,000,000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	1	35,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPJ					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					urusan Keluarga		(dokumen)			urusan Keluarga		Pembangunan Keluarga (dokumen)			
2	14	02		04	Pemetaan Kependudukan		Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan (dokumen)	5	20,000,000	Pemetaan Kependudukan		Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan (dokumen)	5	20,000,000	
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	53,63%	6,359,000,000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	53,63%	6,359,000,000	
			2.03				Cakupan Akseptor Baru (%)	62				Cakupan Akseptor Baru (%)	62		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan		Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	5	6,259,000,000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan		Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di	5	6,259,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPJ					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota					Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		Daerah Kab/Kota			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Larantuka	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	1	6,179,000,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Larantuka	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	1	6,179,000,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Pengguna	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan	9,250	35,000,000	Peningkatan Kesertaan Pengguna	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan	9,250	35,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					an Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)			an Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)			
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Larantuka	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	6	10,000,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Larantuka	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	6	10,000,000	
2	14	03	2.04	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Larantuka	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (laporan)	1	35,000,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Larantuka	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (laporan)	1	35,000,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah		100,000,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat		100,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	7	30,000,000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	7	30,000,000	
2	14	03		04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Larantuka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (laporan)	8	35,000,000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Larantuka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (laporan)	8	35,000,000	
2	14	04			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001%	90,000,000	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001%	90,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2.01				Persentase Balita yang mengikuti KOPER PAUD (%)	80	90,000,000			Persentase Balita yang mengikuti KOPER PAUD (%)	80	90,000,000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				90,000,000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				90,000,000	
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Landia (BKL),	Larantuka	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Landia (BKL),	BKB:135, BKR:52, BKL:41, PIKR:54, UPPKS:57	30,000,000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan	Larantuka	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan	BKB:135, BKR:52, BKL:41, PIKR:54, UPPKS:57	30,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
2	14	04	2.01	04	Orientai dan Pelatihan Teknis Pengelolah	Larantuka	Jumlah Laporan Hasil Orientai dan Pelatihan Teknis Pengelolah	400	30,000,000	Orientai dan Pelatihan Teknis Pengelolah	Larantuka	Jumlah Laporan Hasil Orientai dan Pelatihan Teknis	400	30,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P,PPKS, OIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P,PPKS, OIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P,PPKS, OIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	14	04		14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Larantuka	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	900	30,000,000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Larantuka	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	900	30,000,000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/S UB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Berkualitas					Berkualitas		Berkualitas			

Jika dilihat dari rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Dinas P2KBP3A kondisinya relatif sama baik terhadap jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan juga anggarannya. Perbedaan anggaran hanya terlihat pada sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yakni pada rancangan awal dananya sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan analisa berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dibutuhkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- Kebutuhan penambahan dana sebesar Rp.20.000.000 ini digunakan untuk mengakomodir pengadaan laptop dan printer. Kondisi real laptop dan printer pada Dinas P2KBP3A banyak yang berada dalam keadaan rusak berat.

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2023 Dinas P2KBP3A disusun dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan. Usulan dari pemangku kepentingan dalam konteks perencanaan ini muncul melalui kegiatan musrenbang di 19 kecamatan. Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat ini pada dasarnya adalah mencermati setiap usulan yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah tersebut.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.4 berikut ini:

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Flores Timur

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik(%)		
	Pelebagaan Pangarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)		
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Lewoawang, Riangbaring, Ten awahang, Menan ga, Oyangbaring, Blepanawa, Puken Tobi Wangi Bao, Nimun Danibao, Lite, Oesayang, Amagarapati, Tanah Lein, Ekasapta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah)	15	Diterima sesuai tugas dan fungsi pokok dan Kegiatan Terpusat di Larantuka
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)		
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (dokumen)		

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Leopao, Daniwato, Bubuatagamu, Konga, Lewoingu, Tenawahang, Dawataa, Kewuta, Menanga, Wotobuku, Pohon Siri, Sulengwaseng, Balela, Mokantarak, Weranggere, Ekasapta	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	16	Diterima sesuai tugas dan fungsi pokok dan Kegiatan Terpusat di Larantuka
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Birawan, Pohon Siri, Lewopao, Menanga, Mokantarak, Weranggerek, Lewokluok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	7	Diterima sesuai tugas dan fungsi Dinas
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)		
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	5	Diterima sesuai tugas dan fungsi Dinas
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Bungalawan, Menanga, Puken Tobo Wangi Bao, Balela, Sarotari, Amagarapati	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	6	Diterima sesuai tugas dan fungsi Dinas
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tenawahang, Lamalota, Kenere, Amagarapati	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	4	Diterima sesuai tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usulan masyarakat yang diterima sesuai dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A adalah dengan rincian : dua program, enam kegiatan dan enam sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur melaksanakan dua urusan yakni Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Implementasi dari penyelenggaraan urusan ini selalu diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, secara nasional melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merumuskan empat bidang program sebagai prioritas di tahun 2023. Keempat prioritas tersebut sejalan dengan visi dan misi BKKBN yakni menciptakan keluarga berkualitas serta menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang. *Keempat program prioritas terdiri dari percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).*

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Tahun 2023. Komitmen untuk memberikan upaya yang terbaik dalam memastikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, serta perlindungan khusus dan pemenuhan hak, khususnya dalam pencapaian 5 arahan Presiden menjadi fokus dalam RKA-K/L Kemen PPPA Tahun 2023 yaitu: 1). *Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2). Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4). Penurunan pekerja anak dan, 5). Pencegahan perkawinan anak.*

Selain fokus pada lima isu prioritas pembangunan PPPA sesuai arahan Presiden, kebijakan teknis KemenPPPA dalam pengalokasian Pagu Anggaran Tahun 2023 atau dalam menyusun RKA-KL tahun 2023, diarahkan pada (1) *Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di pusat dan daerah, (2) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di K/L dan daerah, (3) Pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan KIE dan bimtek, (4) Peningkatan sinergi dan kolaborasi antara K/L, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat, (5) Pemantauan efektivitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA), dan (6) Penguatan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).*

Berbagai kebijakan dan prioritas nasional dalam rencana pembangunan tahun 2023 sejalan dengan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2KBP3A

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel. III.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2023
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	3,1
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	91,32	92,24
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	20
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	25

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan. Dalam RKPD tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemban prioritas SDM, kemiskinan, perlindungan social dan stunting, dengan sasaran (1) meningkatnya system layanan pelayanan kesehatan masyarakat (2) meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dengan 3 program prioritas, sebagaimana terlihat pada tabel III.2. berikut;

Tabel III.2

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kekegiatan (Satuan)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2		4	5	6	7	8	9	10
2	0			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				530,000,000				495,000,000
2	0			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik(%)		46,00%	145,000,000		Dalam rangka mendukung penurunan kasus KDRT	47%	125,000,000
2	0			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)		5 Perangka t Daerah	50,000,000			6 Perangka t Daerah	25,000,000

						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Larantuka			APBD II (DAU)		
2	0	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	(perangkat daerah)		5 Perangkat Daerah	50,000,000		6 Perangkat Daerah	25,000,000
2	0	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		1 Dok	70,000,000		1 Dok	70,000,000

						(dokumen)							
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kab/Kota (dokumen)	Larantuka	1 Dok	30,000,000	APBD II (DAU)		1 Dok	30,000,000
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kab/Kota (organisasi)	19 Kec	10 Organisasi	40,000,000	APBD II (DAU)		10 Organisasi	40,000,000

2	0	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)		26 Orang	25,000,000			30 Orang	30,000,000
2	0	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Larantuka	26 Orang	25,000,000	APBD II (DAU)		30 Orang	30,000,000
2	0	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)		0,001%	55,000,000		Dalam rangka mendukung penurunan kasus KDRT	0,001%	55,000,000
2	0	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota yang		24 Orang	55,000,000			24 Orang	55,000,000

						mendapat Penguatan dan Pengembangan (orang)							
2	0				Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (orang)	Larantuka	24 Orang	25,000,000	APBD II (DAU)		24 Orang	25,000,000
2	0				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	Larantuka	1 Dok	30,000,000	APBD II (DAU)		1 Dok	30,000,000
2	0				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		0,02	120.000.000				
2						Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)		8					

2	08	06	2.01	2	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)		1	40.000.000			1	40.000.000
2					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	Berpusat Larantuka (Desa Prioritas Birawan, Pohon Siri, Lepao, Mananga, Mokantarak, Weranggere, Lewokluok)	1	40.000.000	APBD II (DAU)		1	40.000.000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	Larantuka	35	80.000.000				
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	Larantuka	35	35.000.000	APBD II (DAU)		30	35.000.000

2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	Larantuka	35	35.000.000	APBD II (DAU)	1	45.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6,851,000,000			6,365,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		53,63%		Dalam rangka mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas	54,75%	
						Cakupan Akseptor Baru (%)		62%	6,620,000,000		65%	6,165,000,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		5 Jenis	6,475,000,000		5 Jenis	6,014,600,000

2	1					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	19 Kec	1 Laporan	6,280,000,000	APBD II (DAK)		1 Laporan	5,920,600,000
2	1					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	19 Kec	200 orang	35,000,000	APBD II (DAU)		250 Orang	25,000,000
2	1					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	Larantuka	5 unit	35,000,000	APBD II (DAU)		5 unit	10,000,000
2	1					Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	19 Kec	500	100,000,000	APBD II (DAU)		450	24,000,000

						(orang)							
2	1				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		5 Organisasi	65,000,000			5 Organisasi	70,400,000
2	1				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	Larantuka	5 Organisasi	30,000,000	APBD II (DAU)		6 Organisasi	23,000,000

2	1 4	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	19 Kec	8 Dok	35,000,000	APBD II (DAU)	8 Dok	25,000,000
2	1 4	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (laporan)	19 Kec	8 Dok	0	APBD II (DAU)	8 Dok	22,400,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.1. sebagai berikut:

Tabel IV.1.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2-08	2-14	0-0	01		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			11.268.860.800						10.291.600.000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.887.860.800						3.545.000.000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.887.860.800				PP	100	3.545.000.000
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	75						75	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	50						50	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)	8	75.660.000				KP	8	95.800.000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	20.000.000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.660.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	15.800.000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	35.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	35.000.000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	25.000.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)	3	2.369.000.000				KP	3	2.269.000.000
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	28	2.300.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			28	2.200.000.000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	54.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	54.000.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	15.000.000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	15.000.000				KP	1	15.000.000

						(Laporan)									
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PEKERJAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
x	XX	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.000.000
x	XX	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	10.000.000				KP	1	10.000.000
x	XX	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.000.000
x	XX	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	5.000.000	Dalam dan Luar Daerah	APBD II (DAU)			1	5.000.000
x	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	149.000.800				KP	100	150.000.000
x	XX	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	2	2.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	2.000.000
x	XX	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (paket)	3	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	25.000.000
x	XX	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.500.000
x	XX	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	12	60.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	50.000.000
x	XX	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	20.000.800	Larantuka	APBD II (DAU)			1	16.500.000
x	XX	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	28.000.000
x	XX	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000	Dalam dan Luar Daerah	APBD II (DAU)			12	25.000.000
x	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	11 Unit	138.000.000					-	-
x	XX	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	3 Unit	8.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			-	-

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	10	50.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	80.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	90	930.000.000				KP	90	930.000.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2.200.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	2.200.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	25.000.000
x	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	1	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.000.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 (93 orang)	892.800.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 (93 orang)	892.800.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	90	201.200.000				KP	90	75.200.000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	32	130.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	40.000.000
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	4.200.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	4.200.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	42.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	11.000.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi (unit)	9	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			9	10.000.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)	2	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	10.000.000
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			530.000.000						375.000.000
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	46	145.000.000			PN-3	PU-2	47	125.000.000
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)	5	50.000.000			KP-3	KU-2	6	25.000.000
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah)	5	50.000.000	Berpusat di Larantuka (Prioritas Desa Lewoawung, Riangbaring, Tenawahang, Menanga, Oyang Baring, Blepanawa, Puken Tobi Wangi Bao, Nimun Danobao, Lite, Ocsayang, Amagarapati, Tanah Lein, Ekasapta)	APBD II (DAU)			6	25.000.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	70.000.000			KP-3	KU-2	1	70.000.000
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	30.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKTISAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	10	40.000.000	19 Kecamatan (Desa Prioritas Lewopao, Daniwato, Bubuatagamu, Konga, Lewoingu, Tenawahang, Dawataa, Kawuta, Menanga, Watobuku, Pohon Siri, Suleng Waseng, Balela, Mokantarak, Weranggere, Ekasapta)	APBD II (DAU)			10	40.000.000
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)	26	25.000.000	Larantuka		KP-3	KU-2	30	30.000.000
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (lembaga)	26	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			30	30.000.000
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001	55.000.000				PP	0,001	55.000.000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kab/Kota yang mendapat Penguatan dan Pengembangan (orang)	24	55.000.000				KP	24	55.000.000
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	24	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			24	25.000.000
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	30.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai	Tingkat Pratama	160.000.000				PP	Tingkat Madya	145.000.000
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)	1	30.000.000				KP	1	35.000.000
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (laporan)	1	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	35.000.000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)	4	103.000.000				KP	2	90.000.000
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	4	35.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	25.000.000
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	10	38.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	35.000.000
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	30.000.000
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)	1	27.000.000				KP	1	20.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (layanan)	1	27.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	20.000.000
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Dan Gender	Persentase desa/ kelurahan menyediakan data gender (%)	25	50.000.000					25	50.000.000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	50.000.000					1	50.000.000
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	50.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	50.000.000
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	120.000.000			PN-3	PU-2	0,02	120.000.000
						Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	8						8	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	40.000.000			KP-3	KU-2	1	40.000.000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	40.000.000	Berpusat Larantuka (Desa Prioritas Birawan, Pohon Siri, Lepao, Mananga, Mokuntarak, Weranggere, Lewokluok)	APBD II (DAU)			1	40.000.000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	35	80.000.000	Larantuka		KP-3	KU-2	30	80.000.000
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	35	35.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			30	35.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P.N	P.D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	45.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	45.000.000
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			6.851.000.000						132.000.000
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	7	185.000.000				PP	6	90.000.000
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sarasehan dan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Laporan)	1	185.000.000				KP	-	-
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota (dokumen)	1 Dok	75.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan (Dokumen)	6	55.000.000					6	90.000.000
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	1	35.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	45.000.000
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan (dokumen)	5	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	45.000.000
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	53,63	6.565.000.000			PN-3	PU-2	54,75	6.119.600.000
						Cakupan Akseptor Baru (%)	62						65	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	40.000.000	Larantuka		KP-3	KU-2	1	40.000.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	14	03	2.01	02		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	1	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAK)			1	15.000.000
2	14	03	2.01	04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan (Dokumen)	1	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAK)			1	15.000.000
2	14	03	2.01	00		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	10.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAK)			1	10.000.000
2	14	03	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Tetugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Tetugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1	40.000.000			KP-3	KU-2	1	40.000.000
2	14	03	2.02	01		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	15	20.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAK)			15	20.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2013				PRIORITAS		PRAKISAN TAHUN 2014	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	20.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			1	20.000.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota (Jenis)	5	6.385.000.000			KP-3	KU-2	5	6.015.600.000
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	1	6.280.000.000	Larantuka	APBD II (DAK)			1	5.920.600.000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	200	35.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			250	25.000.000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	200	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			250	25.000.000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	5	35.000.000	19 Kecamatan (Desa Prioritas Bungalawan, Menanga, Pukentobi Wangi Bao, Balela, Sarotari, Amagarapati)	APBD II (DAK)			5	10.000.000
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (laporan)	1	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	35.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran (Orang)	500	100.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			450	24.000.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	5	35.000.000			KP-3	KU-2	6	70.400.000
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	5	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	23.000.000
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	8	35.000.000	Desa Tenawang, Lamalota, Kenere, Amagarapti	APBD II (DAU)			8	25.000.000
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (laporan)	8		Larantuka	APBD II (DAU)			8	22.400.000
2	14	04			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	101.000.000					0,001	42.000.000
						Persentase Balita yang mengikuti KOPER PAUD (%)	80	101.000.000					90	42.000.000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	BKB:135, BKR:52 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:57	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			BKB:57, BKR:53 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:56	42.000.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	14	04	2.01	01		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	BKB:135, BKR:52 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:57	21.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			BKB:57, BKR:53 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:56	42.000.000
2	14	04	2.01	04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, OIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	400	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			400	20.000.000
2	14	04	2.01	05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	61	30.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			61	20.000.000
2	14	04	2.01	14		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (keluarga)	300	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			300	28.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan terutama dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.
3. Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha

serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2023 akan berjalan efektif jika terdapat komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkannya dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Tahun 2023.

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur


Sri Ardi Ratnu S.Sos. MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19691016 199903 2 007